

Pembentukan *Civic virtue* Siswa melalui Pendidikan Pancasila untuk Mendukung Kewarganegaraan Global

Ifa Pratiwi^{a, 1*}, Yayuk Hidayah^{a, 2}

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ ifapратиwi.2025@student.uny.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 November 2025;

Revised: 8 Desember 2025;

Accepted: 24 Desember 2025.

Kata kata kunci:

Civic Virtue;

Kewarganegaraan Global;

Pendidikan Pancasila.

: **ABSTRAK**

Globalisasi dan digitalisasi memunculkan beragam problematika seperti hoaks dan intoleran hingga konsepsi kewarganegaraan global. Untuk mendukung kewarganegaraan global, siswa perlu ditanamkan nilai-nilai kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) melalui pendidikan pancasila di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pembentukan *civic virtue* melalui Pendidikan Pancasila untuk mendukung kewarganegaraan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi literatur. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis isi guna mengidentifikasi tema-tema pokok yang muncul dari proses kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pembentukan *civic virtue* melalui Pendidikan Pancasila dapat dirumuskan dalam tiga ranah. Pertama, Pendidikan Pancasila perlu menguatkan pembelajaran nilai yang tidak hanya sekedar pada ranah kognitif atau pengetahuan, namun diwujudkan dalam sebuah tindakan. Kedua, Pendidikan Pancasila perlu memperluas cakupan kewarganegaraan dari konteks lokal, nasional sampai ke konteks global. Ketiga, sekolah perlu menjadi ruang pembentukan warga negara global dengan membuat program sekolah yang dapat memperkuat *civic virtue* siswa. Dengan demikian, *civic virtue* tidak hanya sekedar etika loka saja, namun berfungsi sebagai jembatan antara nilai kebangsaan dengan kewarganegaraan global.

ABSTRACT

The Formation of Students' Civic virtue through Pancasila Education to Support Global Citizenship. Globalization and digitalization have generated various challenges, such as hoaxes, intolerance, and issues related to the concept of global citizenship. To support global citizenship, students need to be instilled with the values of civic virtue through Pancasila Education in schools. This study aims to analyze the implications of forming civic virtue through Pancasila Education to support global citizenship. This research employs a qualitative approach using a literature study method. The collected data were analyzed using content analysis techniques to identify the main themes emerging from the literature review process. The findings of this study indicate that the implications of forming civic virtue through Pancasila Education can be formulated into three domains. First, Pancasila Education needs to strengthen value-based learning that is not merely limited to the cognitive or knowledge domain, but is also manifested in concrete actions. Second, Pancasila Education needs to broaden the scope of citizenship from local and national contexts to the global context. Third, schools need to become spaces for shaping global citizens by developing school programs that can strengthen students' civic virtue. Therefore, civic virtue is not merely a form of local ethics, but also functions as a bridge between national values and global citizenship.

Copyright © 2025 (Ifa Pratiwi & Yayuk Hidayah). All Right Reserved

How to Cite : Pratiwi, I., & Hidayah, Y. (2025). Pembentukan Civic virtue Siswa melalui Pendidikan Pancasila untuk Mendukung Kewarganegaraan Global. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(11), 364–372. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i11.4331>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat dapat mempercepat laju globalisasi dan menjadikan dunia menjadi saling terkoneksi satu sama lain. Era globalisasi ini ditandai dengan konektivitas dengan cakupan yang luas, serta konsep kewarganegaraan yang mengalami transformasi signifikan (Aulia et al., 2024). Tantangan pokok yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan pada era globalisasi meliputi penguatan kompetensi global peserta didik serta pemanfaatan teknologi secara terpadu dalam proses pembelajaran, hingga pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan Pendidikan internasional (Utami et al., 2024). Istianah et al. (2025) mengungkapkan bahwa era digital telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam pola berpikir, cara berkomunikasi, serta pembentukan identitas sosial. Modernisasi zaman seperti ini juga mempengaruhi konsepsi kewarganegaraan, termasuk konsep kewarganegaraan global. Usmi (2023) mengungkapkan bahwa konsep kewarganegaraan global (*global citizenship*) dapat dimaknai sebagai bentuk kewargaan yang memiliki orientasi global, yaitu kesediaan untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif, baik pada tataran nasional maupun internasional, dalam menghadapi berbagai persoalan dunia seperti kemiskinan, ketimpangan, dan tantangan global lainnya yang diharapkan terbentuk warga global yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan dunia yang damai, aman, berkeadilan dan toleran. Namun realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian seperti rendahnya kepedulian sosial, intoleransi, hingga pada maraknya disinformasi dan penyebaran berita *hoaks* di kalangan generasi muda.

Menurut data yang diperoleh dari laman survei APJII (2025), diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 229 juta jiwa pada tahun 2025 dengan pengguna media sosial diperkirakan mencapai 167 juta jiwa. Tingginya pengguna media sosial ini tentu tidak terlepas dari beragam persoalan, salah satunya yakni maraknya berita *hoaks*. Rahadi (2017) mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul dalam penggunaan media sosial saat ini adalah maraknya penyebaran *hoaks*, sehingga bahkan kalangan terdidik pun tidak selalu mampu membedakan informasi yang benar dari informasi palsu. Disamping itu, realitas juga memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia belum menunjukkan etika yang baik di dunia maya. Perencana Ahli Muda, Kedeputan Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Holy Gloria Sijabat mengungkapkan bahwa “adab digital generasi muda sangat rendah, untuk itu perlu membantu mendongkraknya agar sikap toleran dapat terwujud” (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023). Persoalan lain yang juga menjadi sorotan bersama yakni berkaitan dengan sikap intoleransi. Seperti yang dilansir dalam laman Koalisi Advokasi KBB Indonesia, dilaporkan bahwa pada tahun 2024 lalu, terdapat sekitar 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (Koalisi Advokasi KBB Indonesia, 2025). Masifnya berita *hoax*, minimnya adab digital hingga perilaku intoleransi yang terjadi di kalangan generasi muda memperlihatkan bahwa lemahnya nilai-nilai yang tertanam dalam diri generasi muda di Indonesia saat ini.

Dalam konteks tersebut, pembentukan kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) menjadi dasar penting untuk membentuk warga negara yang baik, terutama pelajar sekolah. *Civic virtue* yang dipahami sebagai keadaban atau Kebajikan kewarganegaraan, merujuk pada cara berpikir, nilai etis, moralitas, serta norma yang tepat dalam partisipasi dan keterlibatan warga negara (Rahmelia et al., 2023). *Civic virtue* menegaskan pentingnya kesadaran individu untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan Bersama, disertai sikap empati dan kepedulian terhadap kehidupan sosial (Saragih et al., 2025). Pembentukan *civic virtue* dikalangan pelajar sangat penting dilakukan karena *civic virtue* memiliki cakupan dimensi yang luas seperti sikap, nilai dan perilaku yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu bagian dari sistem Pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Ananto (2018) menyampaikan bahwa pendidikan

Pancasila menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila serta menjadikan warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila merupakan mata Pelajaran yang memuat beragam nilai karakter, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan konsep Kebajikan kewarganegaraan siswa (Ariatama et al., 2022). Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah, diharapkan mampu menjadi alat untuk membentuk *civic virtue* dikalangan siswa. Pembentukan *civic virtue* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks nasional, akan tetapi memiliki kontribusi dalam mendukung kewarganegaraan global. Murdiono (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk membentuk wawasan global pada warga negara muda, Pendidikan Pancasila diarahkan pada pengembangan sikap dan kemauan peserta didik dalam berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia.

Saat ini, siswa tumbuh di zaman yang saling terhubung satu sama lain tanpa ada batasan sekat ruang dan waktu melalui teknologi, media sosial, isu-isu global seperti kemiskinan, iklim, konflik antar negara dan kesenjangan sosial. Karena itu kewarganegaraan global penting untuk dibahas dalam pendidikan karena siswa tidak hanya cukup memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara saja, namun juga sebagai warga dunia. Siswa perlu memiliki kepedulian terhadap persoalan yang lebih luas. Gagasan kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan pancasila perlu berpijak pada nilai-nilai pancasila agar siswa tidak kehilangan identitasnya ketika berhadapan dengan dunia. Kewarganegaraan global dapat dipahami sebagai gagasan yang menekankan kesadaran seseorang terhadap kehidupan dunia yang luas serta posisinya sebagai bagian dari masyarakat global yang mencakup tanggung jawab untuk berperan aktif dalam komunitas, bekerja sama dengan orang lain dan ikut mendorong terwujudnya kehidupan dunia yang damai, berkelanjutan dan berkeadilan (Mulyani et al., 2024).

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, sebelumnya telah ada penelitian yang membahas mengenai pembentukan *civic virtue* dan kewarganegaraan global. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti et al. (2025) yang menerangkan bahwa upaya membina *civic virtue* pada siswa dapat dilakukan melalui pembiasaan untuk saling menolong, melatih tanggung jawab, mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta memberikan arahan dan nasihat secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kewarganegaraan global, Lukmanul Hakim (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan warga negara digital melalui proses dan strategi pembelajaran yang terarah yang tidak hanya memberikan materi tentang wawasan global saja, namun siswa dieksplorasi dan diminta untuk memilih atas dasar keyakinan pribadi, bertanggung jawab dan berani mengevaluasi pilihannya. Selain itu Usman & Kadir (2026) juga menjelaskan Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam pembentukan warga negara global dan berfungsi sebagai sarana penanaman identitas nasional, nilai kebangsaan serta menjadi wahana pengembangan kesadaran global, toleransi dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji persoalan mengenai pembentukan *civic virtue*, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan secara terpisah. Penelitian ini memberikan mengintegrasikan semua topik tersebut secara simultan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada kajian tentang pembentukan *civic virtue* di sekolah melalui Pendidikan Pancasila untuk mendukung kewarganegaraan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai *civic virtue* yang dikembangkan melalui Pendidikan Pancasila serta implikasinya dalam mendukung kewarganegaraan global. Kurikulum merdeka melalui pembelajaran mendalam menekankan penanaman delapan dimensi profil lulusan kepada siswa yang diantaranya yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreatifitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Kedelapan dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam ini sejalan dengan konsep *civic virtue* dan kewarganegaraan global,

terutama pada dimensi kewargaan, kolaborasi dan penalaran kritis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Pancasila di sekolah dengan mengintegrasikan konsep *civic virtue* dengan kewarganegaraan global. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi guru dalam merancang pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berorientasi pada pembentukan *civic virtue* dan kewarganegaraan global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature research*). Studi literatur dapat diartikan sebagai upaya untuk mengumpulkan data penting mengenai suatu subjek atau isu (Febrianto A et al., 2024). Sumber literatur berasal dari berbagai basis data seperti Scilit, Google Scholar, Garuda Dikti dan DOAJ (*Directory of Open Acces Journals*) dengan kata kunci pembentukan *civic virtue*, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan global. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca secara kritis, mencatat, dan menyeleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang telah diperoleh kemudian disaring dengan kriteria inklusif seperti tahun publikasi yakni literatur yang terbit 5 tahun terakhir (2022-2026), literatur berbahasa Indonesia, topik yang dicari sesuai dengan kata kunci, dan jenis literatur yang dicari yakni artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang terindeks SINTA dan Scopus. Sedangkan kriteria eksklusif seperti tahun publikasi yakni literatur yang terbit sebelum tahun 2022, literatur berbahasa asing, topik yang dicari terkait dengan kompetensi kewarganegaraan atau topik lain, dan jenis literatur yang dicari berupa buku, berita dan opini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan tema-tema utama yang muncul dari hasil telaah literatur.

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan *civic virtue* di sekolah menjadi hal penting untuk dilakukan karena pendidikan pancasila tidak hanya membekali siswa untuk paham terhadap aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, namun juga memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. *Civic virtue* atau Kebajikan kewargaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah karena membentuk sikap siswa agar menyadari hak dan kewajibannya, baik sebagai pelajar di tingkat sekolah sekaligus kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki sikap bertanggung jawab. Bray & Chappell (2005) mengatakan bahwa *civic virtues are the qualities of character and personal skills necessary to make the exercise of citizenship meaningful and civic virtues also give us the capacity to exercise our rights, promote our interest and meet our duties*. pendapat tersebut menyiratkan bahwa *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan adalah kualitas karakter seseorang yang sangat diperlukan. *Civic virtue* menjadi cerminan standarisasi nilai karakter warga negara (Samsuri, 2004).

Temuan literatur memperlihatkan bahwa sekolah memiliki peran yang cukup strategis dalam pembentukan *civic virtue*. Pengintegrasian *civic virtue* dalam Pendidikan karakter melalui berbagai program sekolah berperan besar dalam mendukung pembentukan dan pengembangan karakter siswa (Latifah et al., 2019). Sekolah menjadi ruang strategis dalam membentuk *civic virtue* karena sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter, nilai, dan budaya demokratis. Urgensi pembentukan *civic virtue* di sekolah karena siswa hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks, plural, dan terhubung secara global. Oleh karena itu, sekolah perlu membekali peserta didik dengan nilai tanggung jawab, kepedulian sosial, toleransi, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dan etis. Hal ini dapat dilakukan melalui program sekolah maupun dalam pembelajaran di kelas, utamanya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Apabila dilihat lebih mendalam, *civic virtue* memiliki hubungan erat dengan tiga komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. *Civic knowledge* berkaitan dengan pengetahuan siswa terhadap pancasila, konstitusi, hak dan kewajiban

warga negara, demokrasi dan persoalan kewarganegaraan. Pengetahuan yang dimiliki tidak akan cukup apabila tidak diimbangi dengan keterampilan dan sikap kewarganegaraan. Di sinilah *civic skill* berperan agar siswa mampu berdialog, berpikir kritis, berpendapat, mengambil keputusan hingga menyelesaikan suatu masalah dengan demokratis. Di sisi lain, *civic disposition* berperan dalam agar siswa memiliki sikap kewarganegaraan seperti tanggung jawab, toleransi, peduli, jujur dan disiplin. Dengan demikian *civic virtue* dapat dipahami sebagai hasil bertemunya ketiga kompetensi kewarganegaraan tersebut.

Pendidikan Pancasila menjadi instrumen nyata Pendidikan nilai dan karakter bagi siswa di sekolah karena memiliki hubungan erat antara *civic virtue*, *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya mencakup dimensi kognitif semata, namun juga mencakup dimensi afektif yang tercermin dalam sebuah sikap dengan standar nilai yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bagian penting dalam membekali siswa sebagai bagian dari warga negara agar mampu menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab (Harahap et al., 2025). Lebih lanjut Arif (2017) juga mengungkapkan bahwa melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, siswa tidak hanya difasilitasi untuk menghormati keberagaman, tetapi harus ditanamkan nilai Kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang meliputi karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) sebagai kerangka dasar pembentukan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) berdasarkan nilai Pancasila. Pembentukan *civic virtue* melalui Pendidikan Pancasila juga penting untuk menjaga keseimbangan antara identitas nasional dan orientasi global.

Dari temuan tersebut dapat disintesis bahwa pembentukan *civic virtue* melalui pendidikan pancasila harus bergerak dari pengetahuan menjadi sebuah tindakan. *Civic virtue* dalam konteks pendidikan di sekolah, tidak hanya dipahami sebagai sebuah aturan semata, melainkan diyakini sebagai kualitas kewarganegaraan yang menjangkau berbagai aspek sikap seperti toleransi, kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan berdialog dan partisipasi sosial. Sedangkan kewargaan global atau *global citizenship* merupakan konsep yang menempatkan siswa sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dengan demikian, *civic virtue* menjadi pijakan awal pembentukan siswa sebagai warga negara yang mampu memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat lokal, nasional seklaigus masyarakat global. Kewarganegaraan global menuntut siswa memiliki kemampuan memahami persoalan dunia kontemporer seperti krisis lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi sosial, hak asasi manusia, konflik antar negara, bahkan masifnya penyebaran berita palsu (*hoax*). Usmi & Samsuri (2022) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan global menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda khususnya siswa sebagai bagian dari warga negara untuk memahami dinamika dunia masa kini, berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi berbagai persoalan nasional maupun global, serta berkontribusi bagi terciptanya kehidupan dunia yang lebih adil, damai, toleran, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Disini pembentukan *civic virtue* penting karena menjadi basis nilai penghubung antara pengetahuan global dengan perilaku siswa sehari-hari. Pengetahuan yang didapat harus diimbangi dengan sikap yang tercermin dalam diri siswa sehingga *civic virtue* dapat terbentuk dan bukan hanya sekedar nilai dalam domain kognitif saja. *Civic virtue* dan kewarganegaraan global harus berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Siswa yang memiliki pengetahuan global tetapi tidak memiliki kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*), maka siswa tersebut hanya akan memahami sebuah isu dunia saja tanpa ada dorongan untuk berperan langsung menjadi bagian dalam penyelesaian masalah. Sebaliknya jika siswa memiliki kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) diimbangi dengan wawasan global, maka siswa akan beranggapan bahwa isu dunia merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai siswa sekaligus sebagai warga negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *civic virtue* menjadi dasar penting bagi siswa untuk mendukung kewarganegaraan global karena menempatkan siswa langsung menjadi bagian dari warga dunia.

Sekolah melalui pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila berperan dalam penanaman nilai-nilai kepada siswa yang selaras dengan nilai Pancasila seperti nilai religious, humanis, nasionalis, demokratis dan juga *justice*. Nilai ini menjadi dasar etis dalam pengembangan sikap siswa. Pembentukan *civic virtue* melalui pendidikan Pancasila penting untuk menjaga keseimbangan antara identitas nasional dan orientasi global. Dalam hal ini kewarganegaraan global tidak dipahami untuk mempersempit nasionalisme, justru sebaliknya yakni memperluas nasionalisme siswa sebagai bagian dari warga dunia dengan mengesampingkan sekat-sekat geografis. Sutrisno et al. (2023) juga menekankan bahwa Pendidikan kewarganegaraan global dalam perspektif dimensi profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan dengan proyek budaya, kewirausahaan, kuliner Nusantara dan pelestarian lingkungan. Pendidikan Pancasila menjadi sarana pembentukan *civic virtue* untuk mendukung kewarganegaraan global melalui model pembelajaran yang memberikan ruang pengalaman nyata untuk siswa.

Dimensi lain dalam *civic virtue* adalah kemampuan dalam menghargai adanya keberagaman. Kewarganegaraan global dibangun atas dasar toleransi terhadap pluralitas dan kemajemukan bangsa dunia. Sikap ini dapat terbentuk melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah, sehingga siswa dapat tertanam sikap toleransi sedini mungkin. Istianah et al. (2024) menekankan bahwa Pendidikan kebinekaan dalam Pendidikan Pancasila dapat menciptakan lingkungan sekolah yang damai melalui integrasi kebijakan, Pendidikan multicultural, toleransi dan penghargaan terhadap adanya keberagaman. Kemudian dalam konteks kewarganegaraan global, keberagaman tidak boleh dipandang sebagai ancaman, namun sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis.

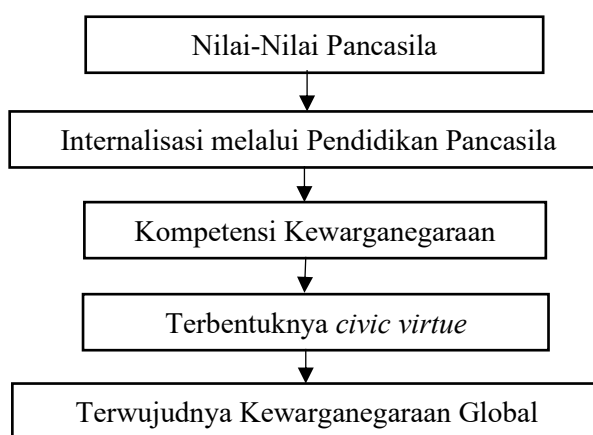
Pembentukan *civic virtue* di sekolah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki implikasi penting dalam pengembangan kewarganegaraan global. *Civic virtue* tidak hanya berkaitan dengan karakter saja, namun juga pembentukan karakter itu sendiri. Karakter ini diperlukan siswa untuk menjalankan peran sebagai pelajar dan juga sebagai warga negara serta warga dunia yang bertanggung jawab dan peduli perihal persoalan bersama. *Civic virtue* dipahami sebagai jembatan antara nilai dasar Pancasila dengan kebutuhan siswa untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu *civic virtue* memiliki posisi sebagai inti dari pembelajaran Pendidikan Pancasila, bukan hanya sekedar materi tambahan. Melalui pembentukan *civic virtue* inilah siswa memiliki moralitas publik, sadar akan kebangsaan dan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan sebagai warga negara maupun warga dunia.

Implikasi pertama pembentukan *civic virtue* yakni, menguatnya orientasi Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan Pancasila tidak hanya sekedar menghafalkan nilai-nilai saja, namun lebih mengarahkan siswa untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Sunarso et al. (2024) menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Pancasila memiliki peran filosofis dalam meneguhkan identitas kewarganegaraan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila harus lebih bersifat praktis dan transformatif dengan menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Implikasi yang kedua, perlu adanya penguatan kurikulum Pendidikan Pancasila agar pembelajaran Pancasila lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer dunia. Kewarganegaraan global menuntut siswa untuk mampu memahami persoalan lintas negara, sehingga tidak hanya terpaku pada persoalan-persoalan lokal maupun nasional semata. Perlu adanya materi yang mengintegrasikan isu di ranah lokal, nasional, maupun global secara simultan. Implikasi yang ketiga, perlu adanya pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis pengalaman dan partisipasi sehingga meminimalisir dominasi guru di kelas. Hal ini dimaksudkan agar Pendidikan Pancasila tidak sekedar Pelajaran yang bersifat hafal taua tekstual saja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno et al. (2021) menunjukkan model pembelajaran proyek warga global dalam Pendidikan Pancasila memiliki karakteristik pengembangan iman dan takwa serta karakter, toleransi dan wawasan global. Implikasi yang keempat berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini lebih dikenal dengan dimensi profil lulusan diantaranya yakni keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan dan komunikasi. Kedelapan dimensi profil

lulusan ini relevan dengan *civic virtue*. Kemudian implikasi yang kelima adalah perlunya penguatan budaya sekolah yang demokratis. Pembentukan *civic virtue* tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga didukung dengan program sekolah.

Sintesis dari berbagai temuan literatur tersebut menunjukkan bahwa pembentukan *civic virtue* melalui pendidikan pancasila memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, Pendidikan Pancasila perlu memperkuat pembelajaran nilai yang tidak hanya sekedar pada ranah aspek kognitif atau pengetahuan, namun diwujudkan dalam sebuah tindakan. Siswa perlu diajak untuk memahami nilai dan merasakan pentingnya nilai tersebut, serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Pendidikan Pancasila perlu memperluas cakupan kewarganegaraan dari konteks lokal, nasional sampai ke konteks global. Siswa perlu memahami bahwa mereka hidup dalam dunia yang saling terhubung, sehingga isu global juga berkaitan dengan kehidupan siswa. Ketiga, sekolah perlu menjadi ruang pembentukan warga negara global dengan membuat program sekolah yang relevan untuk memperkuat *civic virtue* seperti proyek sosial, kegiatan kebinekaan, literasi digital, organisasi siswa dan pembiasaan lainnya. Secara garis besar, sintesis dari temuan literatur di atas dapat dilihat pada bagan 1 berikut.

Bagan 1. Alur Konseptual



Dengan demikian kontribusi utama *civic virtue* terhadap pendidikan pancasila berbasis kewarganegaraan global terletak pada kemampuan siswa itu sendiri untuk menjadikan pembelajaran kewarganegaraan lebih hidup dan relevan. Pendidikan pancasila tidak hanya dipahami sebagai pelajaran yang hanya terbatas pada konsepsi tentang aturan, negara atau hak dan kewajiban warga negara saja, melainkan sebagai pendidikan yang membentuk siswa agar mampu berpikir kritis, bersikap etis dan peduli terhadap sesama. Dalam konteks tataran global, siswa perlu dibentuk menjadi warga negara yang tidak hanya bangga terhadap identitas nasionalnya saja, tetapi memiliki kepedulian terhadap dunia. Oleh karena itu, pembentukan *civic virtue* melalui Pendidikan Pancasila menjadi salah satu jalan penting untuk menyiapkan siswa sebagai warga negara yang berkarakter Pancasila sekaligus memiliki kesadaran global.

Simpulan

Berdasarkan sintesis antarsumber, dapat disimpulkan bahwa pembentukan *civic virtue* melalui pendidikan pancasila memiliki peran penting dalam menyiapkan siswa sebagai warga negara dan warga dunia. *Civic virtue* menjadi penghubung antara *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition* karena pengetahuan kewarganegaraan yang dimiliki harus diimbangi dengan keterampilan dan sikap kewarganegaraan yang nyata. Pembelajaran pendidikan pancasila perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan pada aspek kognitif semata, namun juga pada pembentukan karakter hingga tindakan kewarganegaraan. Dalam konteks kewarganegaraan global, menuntut siswa memiliki kemampuan memahami persoalan dunia kontemporer. Dengan demikian, *civic virtue* tidak hanya sekedar etika loka

saja, namun berfungsi sebagai jembatan antara nilai kebangsaan dengan kewarganegaraan global. Pendidikan pancasila tidak hanya berperan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik secara nasional, tetapi juga warga global yang berkarakter, beretika dan mampu berkontribusi menciptakan kehidupan dunia yang lebih damai, aman, adil dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi terhadap guru pendidikan pancasila agar dapat mengintegrasikan nilai *civic virtue* ke dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi sekolah, penelitian ini berimplikasi pada pentingnya membangun lingkungan sekolah yang lebih demokratis dan partisipatif melalui berbagai program sekolah. Sinergi antara semua warga sekolah baik siswa, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan dapat memperkuat nilai *civic virtue*.

Referensi

- Ananto, P. (2018). Implementasi pembelajaran pendidikan Pancasila pada Kurikulum 2013 melalui pendekatan pendidikan kecakapan hidup. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 6(2), 23–36. <https://doi.org/10.46961/jip.v6i2.110>
- APJII. (2025). *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia: Survei*. <https://survei.apjii.or.id/>
- Ariatama, S., Prayoga, A., Sopha, F. Z. A., Anggraini, M. S., & Handayani, W. (2022). Penanaman pendidikan karakter dalam mengembangkan warga negara pada era generasi milenial. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.513>
- Arif, D. B. (2017). Pengembangan kebajikan kewargaan (*civic virtue*) dalam masyarakat multikultural Indonesia: Peran pendidikan kewarganegaraan. *Journal Civics and Social Studies*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.31980/journalcss.v1i1.257>
- Aulia, C., Susanti, E., Fiona, E., Nasywa, F., & Ramadhan, I. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap konsep kewarganegaraan di era digital. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(7), 247–252. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i7.2189>
- Bray, B. L., & Chappell, L. W. (2005). Civic theater for civic education. *Journal of Political Science Education*, 1(1), 83–108. <https://doi.org/10.1080/15512160590907630>
- Febrianto, A., Rusdy, A. S., & Hartatiana. (2024). Studi literatur: Landasan dalam memilih metode penelitian yang tepat. *Journal Educational Research and Development*, 1(2), 259–263. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>
- Harahap, F. H., Rahayu, H., Manurung, M. A., Simbolon, P., Bungana, R., Perangin-Angin, B., Pascasarjana, P., & Dasar, P. (2025). Eksistensi civics sebagai fondasi awal pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 242–252. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34621>
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriastari, S. (2024). Peran pendidikan kebinekaan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10192>
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., Wiratomo, G. H., & Habibah, S. M. (2025). Internalisasi nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika* dalam mewujudkan sekolah damai: Studi kasus sekolah menengah pertama di Kota Bekasi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(5), 193–204. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i5.4283>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Adab digital Indonesia rendah, generasi muda harus lawan hoax dan ujaran kebencian*. <https://www.kemenkopmk.go.id/adab-digital-indonesia-rendah-generasi-muda-harus-lawan-hoax-dan-ujaran-kebencian>
- Koalisi Advokasi KBB Indonesia. (2025). *Orang muda vs toleransi murahan*. <https://kbb.id/2025/12/09/orang-muda-vs-toleransi-murahan/>
- Latifah, I., Sundawa, D., & Syaifullah, S. (2019). Implementasi program Adiwiyata dalam mengembangkan *civic disposition* siswa di SMK Negeri 1 Karawang. *Jurnal Civicus*, 19(1), 18–26. <https://doi.org/10.17509/civicus.v19i1.25930>
- Lukmanul Hakim, A. (2022). Kewarganegaraan digital, penguatan wawasan global warga negara, dan peran pendidikan kewarganegaraan di dalamnya. *Maarif*, 17(1), 30–47. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i1.153>
- Mulyani, H., Komalasari, K., Permatasari, M., Bribin, M. L., & Suriaman, S. (2024). Transformasi

- pendidikan kewarganegaraan global di era abad 21: Analisis implementasi dan tantangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1), 88–101. <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.55115>
- Murdiono, M. (2014). Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun wawasan global warga negara muda. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(3). <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2379>
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Rahmayanti, V., Moeis, I., Montessori, M., & Indrawadi, J. (2025). Strategi guru PPKn dalam membina *civic virtue* pada siswa kelas IX SMP. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(1), 101–106. <https://doi.org/10.24036/jecco.v5i1.632>
- Rahmelia, S., Apandie, C., Pendidikan, P., Kristen, A., Keguruan, F., Pendidikan, I., Agama, K. I., Negeri, K., Raya, P., Kristen, P. P., Sosial, I., Kristen, K., & Agama, I. (2023). *Civic virtue* dalam pendidikan Kristen guna memperkuat etika digital di era 4.0. *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 4(1), 69–86. <https://doi.org/10.46305/im.v4i1.154>
- Samsuri, S. (2004). *Civic virtues* dalam pendidikan moral dan kewarganegaraan di Indonesia era Orde Baru. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.21831/civics.v1i2.5719>
- Saragih, K. W., Gultom, S., Sitingjak, I. Y., Suhendar, A., Marini, N., Damanik, J., Saragih, S. R., & Damanik, M. S. (2025). Penguatan *civic virtue* siswa SMP Negeri 1 Dolok Pardamean melalui program pencegahan perundungan di sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(2), 360–368. <https://doi.org/10.36985/m3mev943>
- Sunarso, S., Hidayah, Y., Firmasnyah, A., & Arpanudin, I. (2024). Content analysis of Pancasila and civic education curriculum at the junior high school level in Indonesia: Philosophical perspectives in affirming civic identity. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 98–106. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.63161>
- Sutrisno, S., Sapriya, S., Komalasari, K., & Rahmad, R. (2021). Implementasi model pembelajaran proyek warga global dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 155–164. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p155-164>
- Sutrisno, S., Sunarto, S., & Jumadi, J. (2023). Global citizenship education in the perspective of strengthening Pancasila student profiles. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 322–331. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.63983>
- Usman, N. A., & Kadir, M. I. (2026). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan warga negara global. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1). <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1970>
- Usmi, R. (2023). Analisis kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p1-9>
- Usmi, R., & Samsuri, S. (2022). Urgensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 149–160. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p149-160>
- Utami, C. D., Armayani, E., Ariani, I., Lubis, R. N., Sari, S. H., Fransisca, Y., Hutasuht, Y. S. H., & Nasution, I. (2024). Strategi manajemen organisasi pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2047–2055. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3057>